

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi nirlaba adalah lembaga yang dibentuk untuk tujuan sosial, keagamaan, pendidikan, atau kemanusiaan. Organisasi ini tidak bertujuan mencari keuntungan finansial. Meski begitu, mereka tetap menjalankan aktivitas ekonomi seperti menerima sumbangan, iuran, hibah, membayar gaji pegawai, menyelenggarakan kegiatan, serta menyediakan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan organisasi. Karena aktivitas ekonominya yang kompleks, organisasi nirlaba tetap membutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik agar bisa transparan dan akuntabel di hadapan semua pihak, baik internal maupun eksternal.

Menurut Harun (2007:14), organisasi nirlaba memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memprioritaskan perolehan laba. Karena itu, pengelolaan keuangan dalam organisasi ini harus tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Hal ini penting karena mayoritas dana yang diterima berasal dari masyarakat atau instansi pemerintah. Tanpa pelaporan yang baik, organisasi nirlaba dapat kehilangan kepercayaan masyarakat. Laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kini menjadi kebutuhan utama, bukan hanya untuk pemenuhan kewajiban administratif.

Masyarakat, donatur, hingga pemerintah, menuntut organisasi agar menjalankan tata kelola yang baik (good governance). Masih banyak organisasi nirlaba yang menyusun laporan keuangan secara manual, tidak sesuai standar, dan sulit dipahami. Hal ini memperlihatkan pentingnya penerapan standar akuntansi yang benar dan mudah dipahami, khususnya di sektor nirlaba. Perjalanan standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia dimulai dari PSAK 45. PSAK 45 pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam PSAK ini, organisasi nirlaba diwajibkan menyusun empat jenis laporan

keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan aktivitas digunakan sebagai pengganti laporan laba rugi. Isinya menggambarkan perubahan aset neto terikat dan tidak terikat. PSAK 45 menjadi dasar awal bagi organisasi nirlaba untuk membuat laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial mereka (IAI, 1997).

Namun dalam pelaksanaannya, PSAK 45 memiliki keterbatasan. Format dan istilah yang digunakan berbeda dari laporan keuangan bisnis, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pengguna laporan yang terbiasa dengan istilah umum. Selain itu, laporan aktivitas dinilai kurang menggambarkan secara menyeluruh kondisi dan kinerja organisasi, terutama bagi para pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi berbasis laba-rugi dan arus sumber daya. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan penyusunan laporan keuangan yang selaras dengan entitas bisnis, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35.

ISAK 35 memberikan interpretasi bahwa organisasi nirlaba dapat menyusun laporan keuangan mengikuti PSAK umum seperti PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan) dan PSAK 25 (Kebijakan Akuntansi dan Perubahan Estimasi). Dengan ISAK 35, laporan aktivitas dapat diganti dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Organisasi juga bisa menyajikan laporan keuangan dengan cara yang lebih umum, seperti perusahaan biasa, namun tetap menyampaikan karakteristik nirlaba mereka lewat catatan tambahan. Meskipun lebih fleksibel, ISAK 35 belum menjelaskan secara rinci bagaimana mengukur kinerja keuangan organisasi nirlaba dari sisi tanggung jawab pengelolaan dana.

Sebagai respons terhadap kekosongan pengaturan tersebut, IAI merilis ISAK 335 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. ISAK 335 menjelaskan bagaimana menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba secara menyeluruh dan mendalam. Dalam ISAK ini, organisasi diwajibkan membuat lima laporan utama: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Standar ini juga memperkenalkan klasifikasi aset neto menjadi tiga kategori utama: tanpa

pembatasan, pembatasan sementara, dan pembatasan permanen. Dengan klasifikasi ini, entitas nirlaba dapat menyampaikan informasi penggunaan dana dengan lebih transparan.

ISAK 335 tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga efisiensi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan organisasi. Standar ini mengajak organisasi nirlaba untuk menyusun kebijakan keuangan yang lebih sistematis dan terdokumentasi, termasuk dalam mengidentifikasi kewajiban jangka panjang, cadangan dana darurat, serta mengukur efisiensi pelaksanaan program. Menurut Mardiasmo (2018:155), penerapan prinsip akuntabilitas dalam sektor publik dan nirlaba harus mencerminkan tanggung jawab atas pengelolaan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Meskipun ISAK 335 memiliki keunggulan yang sangat penting, implementasinya masih menemui berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam organisasi nirlaba. Banyak yayasan atau lembaga sosial tidak memiliki staf keuangan yang memahami standar akuntansi. Mayoritas pelaporan masih dikerjakan oleh pengurus yayasan yang memiliki latar belakang non-akuntansi. Hal ini menyebabkan laporan keuangan sering kali hanya berbentuk kas masuk dan kas keluar tanpa pengklasifikasian akun yang memadai.

Hambatan lainnya adalah kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis dalam menerapkan ISAK 335, khususnya di daerah. Organisasi yang berada di daerah pelosok tidak memiliki akses kepada pelatihan akuntansi berbasis standar terkini. Selain itu, belum adanya regulasi wajib dari pemerintah juga menyebabkan penerapan ISAK 335 masih bersifat sukarela. Jika tidak ada tekanan dari pembina yayasan, instansi terkait, atau pemberi hibah, maka pengurus cenderung tidak menerapkan standar ini karena dianggap rumit dan tidak mendesak.

Kesulitan lain yang sering muncul adalah tidak adanya sistem pencatatan atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk organisasi nirlaba kecil. Kebanyakan sistem akuntansi yang tersedia di pasaran didesain untuk entitas bisnis, dan belum memiliki fitur pelaporan berbasis ISAK 335. Hal ini membuat proses pelaporan

semakin sulit bagi organisasi nirlaba skala kecil. Permasalahan ini sejalan dengan pendapat Suwanda (2019:72) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem keuangan di sektor publik dan nirlaba masih jauh tertinggal dibandingkan sektor bisnis.

Pergantian kepengurusan yang tidak diikuti dengan pengarsipan keuangan yang baik juga menjadi kendala besar. Banyak yayasan kehilangan catatan keuangan karena tidak adanya sistem dokumentasi dan penyimpanan yang baik. Akibatnya, pelaporan antarperiode tidak memiliki kesinambungan data yang memadai. Sebagian besar permasalahan tersebut terlihat nyata di Yayasan TK Al Mumtaza Bengkalis. Yayasan ini merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang beroperasi dalam sektor nirlaba dan memiliki peran strategis dalam pendidikan anak di wilayah Bengkalis. Namun berdasarkan observasi awal, sistem pelaporan keuangan yayasan ini masih sangat sederhana, belum mengacu pada ISAK 335, dan belum menggunakan prinsip akrual. Laporan masih berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar tanpa klasifikasi dana berdasarkan kegiatan maupun asal penggunaan dana.

Laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, dan laporan perubahan aset neto yang seharusnya menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban yayasan tidak tersedia. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyusun anggaran tahunan yang tepat, menilai efisiensi penggunaan dana, serta memberikan informasi kepada pihak eksternal seperti orang tua siswa, dinas pendidikan, dan donatur. Akibatnya, kepercayaan dan dukungan terhadap yayasan juga berpotensi menurun jika laporan keuangan tidak disusun secara transparan.

Penelitian terdahulu telah banyak mengangkat pentingnya penerapan ISAK 335 dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Anjani dan Bharata (2022) dalam jurnal *Akuntansi dan Kebijakan Publik* menyatakan bahwa sebagian besar yayasan belum menyusun laporan penghasilan komprehensif dan perubahan aset neto sesuai ISAK 335. Lasfita dan Muslimin (2020) dalam penelitian mereka terhadap organisasi keagamaan di Jawa Barat menemukan bahwa laporan keuangan yang disusun tidak mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi keuangan lembaga.

Penelitian oleh Rachmawati dan Yusuf (2021) menunjukkan bahwa organisasi yang menyusun laporan sesuai ISAK 335 lebih dipercaya oleh donatur dan lembaga mitra. Sementara itu, Putri dan Santoso (2020) menekankan bahwa lemahnya dorongan regulasi dan pengawasan membuat penerapan ISAK 335 cenderung stagnan. Nugroho dan Ramadhan (2023) menemukan bahwa pelatihan dan pendampingan penerapan ISAK 335 meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan nirlaba dalam menyusun laporan keuangan yang lebih rapi dan akurat.

Fitriani (2021) menyimpulkan bahwa penerapan ISAK 335 mendukung penyusunan anggaran yang realistis serta meningkatkan efisiensi belanja operasional. Zulaikha dan Andini (2022) mengungkapkan bahwa ISAK 335 memperkuat proses evaluasi kinerja keuangan dan membantu auditor dalam menilai tanggung jawab manajemen yayasan. Sementara Hidayat (2023) dalam studi kasus pada yayasan pendidikan Islam di Kalimantan menyatakan bahwa laporan keuangan berbasis ISAK 335 mampu menjadi dasar perencanaan strategis jangka panjang. Melalui berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan ISAK 335 tidak hanya penting dari sisi teknis pelaporan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan lembaga nirlaba. Oleh karena itu, Yayasan TK Al Mumtaza Bengkalis perlu menjadi contoh penerapan standar ini, baik sebagai model percontohan di wilayah Bengkalis maupun sebagai bahan kajian akademik bagi pengembangan tata kelola organisasi nirlaba di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana ISAK 335 dapat diterapkan secara nyata di yayasan pendidikan skala kecil seperti TK Al Mumtaza Bengkalis. Penelitian ini mengambil lokasi studi pada Yayasan TK Al Mumtaza Bengkalis sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “Penerapan Kinerja Keuangan Sektor Nirlaba Melalui ISAK 335 Studi Kasus Yayasan TK Al Mumtaza Bengkalis.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan ISAK 335 dalam penyajian laporan keuangan pada Yayasan TK Al Mumtaza Bengkalis sebagai entitas sektor non publik?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Yayasan TK Al Mumtaza dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 335?
3. Bagaimana hasil penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 dapat menggambarkan kinerja keuangan Yayasan TK Al Mumtaza secara transparan dan akuntabel?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan utama, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek, yaitu Yayasan TK Al Mumtaza Bengkalis, yang merupakan entitas nirlaba di sektor pendidikan.
2. Standar akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada ISAK 335 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba, tanpa membahas standar lain seperti PSAK 45 secara mendalam.
3. Penyusunan laporan keuangan dalam penelitian ini hanya mencakup periode satu tahun terakhir 2024, berdasarkan data yang tersedia dari pihak yayasan.
4. Fokus analisis terbatas pada proses penerapan ISAK 335, kendala dalam penyusunan laporan keuangan, serta evaluasi terhadap kinerja keuangan berdasarkan laporan yang telah disusun oleh peneliti.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis penerapan ISAK 335 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Yayasan TK Al Mumtaza Bengkalis.
2. Untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Yayasan TK Al Mumtaza dalam menerapkan ISAK 335.
3. Untuk menyusun laporan keuangan Yayasan TK Al Mumtaza berdasarkan ISAK 335 dan mengevaluasi bagaimana laporan tersebut mencerminkan kinerja keuangan yayasan secara transparan dan akuntabel.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan analisis, serta memperdalam pemahaman mengenai standar akuntansi untuk entitas nirlaba, khususnya ISAK 35, melalui praktik langsung penyusunan laporan keuangan dan evaluasi kinerja keuangan yayasan.
2. Bagi Pihak Kampus (Politeknik Negeri Bengkalis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ajar, referensi pembelajaran, dan pengayaan materi praktik akuntansi sektor nonpublik, khususnya yang berkaitan dengan penerapan ISAK 35 dan penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba.
3. Bagi Yayasan TK Al Mumtaza, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki sistem pelaporan keuangan yang lebih akuntabel dan sesuai standar, sekaligus sebagai alat bantu dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah untuk pengembangan studi lebih lanjut mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba dan kinerja keuangannya, baik dari aspek implementasi standar maupun kajian kebijakan sektor pendidikan nirlaba.